

Masalah kebijakan sistem pendidikan di Indonesia

Harning Jamiar

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: harning.jamiar0904@gmail.com

Kata Kunci:

pendidikan; kebijakan;
sistem pendidikan

Keywords:

education; policy;
education system

ABSTRAK

Pendidikan merupakan proses penting dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasan, kreatifitas atau keterampilan, akhlak dan memperkuat kepribadian. Karakteristik dari sistem pendidikan diantaranya, memiliki tujuan pendidikan, memenuhi dari bidang legal dan formal, mempunyai konsep operasional, dibuat oleh yang berwenang, bisa dievaluasi, dan mempunyai sistematika. Namun tidak dipungkiri banyak juga masalah yang ada pada kebijakan sistem

pendidikan seperti rendahnya kualitas sarana dan prasarana, Rendahnya kualitas guru dan tenaga pendidik yang tidak merata, Masalah kurikulum di Indonesia, dan Biaya pendidikan yang mahal.

ABSTRACT

Education is an important process in order to increase intelligence, creativity or skills, morals and strengthen personality. Characteristics of an education system include having educational goals, fulfilling legal and formal aspects, having an operational concept, being created by the authorities, being able to be evaluated, and being systematic. However, it cannot be denied that there are also many problems that exist in the education system policy, such as the low quality of facilities and infrastructure, the low quality of teachers and unequal teaching staff, curriculum problems in Indonesia, and expensive education costs.

Pendahuluan

Pendidikan adalah suatu proses yang penting dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasan, kreatifitas atau keterampilan, akhlak dan memperkuat kepribadian. Pendidikan merupakan sesuatu kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap orang atau individu. Pendidikan sendiri tidak terlepas dari segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Pendidikan sendiri sebenarnya dibagi menjadi tiga yaitu Pendidikan formal yang terdiri dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, kemudian Pendidikan informal yang jenis pendidikannya terdapat pada Masyarakat atau lingkungan keluarga yang dilaksanakan dengan tidak terikat oleh organisasi tertentu. Dan terakhir adalah Pendidikan non formal, Pendidikan ini merupakan Pendidikan yang terorganisir akan tetapi diluar dari Pendidikan formal. Pada pembahasan ini akan dibahas tentang Pendidikan formal.

Pendidikan adalah hal pokok yang disepakati di negara dan bangsa manapunh. Kualitas Pendidikan dalam suatu negara menentukan bagaimana kualitas negara tersebut. Buruknya kualitas Pendidikan yang ada juga dapat membuat negara tersebut



mengalami ketertinggalan. Walau demikian, seperti yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) yang berisi pernyataan bahwa setiap warga negara berhak dalam memperoleh Pendidikan. Hal ini berarti Pendidikan Indonesia tetap mengacu kepada hak asasi setiap diri anak bangsa.

Tujuan Pendidikan sendiri akan tercapai jika dibarengi dengan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan dalam artian lain mewujudkan kebijakan tersebut. Sejatinya kebijakan itu sendiri bertujuan membawa kearah yang lebih baik lagi. Dengan adanya kebijakan Pendidikan suatu negara dapat mencapai cita-cita atau tujuan yaitu dengan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, masalah kebijakan di Indonesia di anggap cukup banyak, mulai dari kualitas sumber daya manusia, dari segi sarana dan prasarana, bahkan sampai pada biaya Pendidikan yang mahal. Selain dari itu, masih banyak masyarakat terutama sebagai konsumen Pendidikan merasa terbebani karena kebanyakan dari masyarakat tidak ingin adaptasi baru dengan kebijakan yang baru yang mereka rasa memberatkan, hal ini karena kurangnya penguasaan pengetahuan mengenai bagaimana cara dalam menyikapi kebijakan sistem pendidikan.

Oleh sebab itu, betapa pentingnya diri mengetahui serta memahami bagaimana masalah dalam kebijakan system pendidikan di Indonesia dan juga implementasi dalam kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan menjadi Langkah dalam memberikan kejelasan serta arah yang semestinya ditempuh dan juga dilaksanakan bagi penyelenggara pendidikan.

Pembahasan

Pengertian Kebijakan Sistem Pendidikan di Indonesia

Kebijakan merupakan aturan tertulis formal organisasi yang memiliki sifat mengikat, mengatur perilaku dengan tujuan agar menciptakan nilai baru di Masyarakat. Kebijakan ini akan menjadi rujukan utama bagi Masyarakat ataupun anggota organisasi dalam berperilaku. Landasan paling utama dalam kebijakan adalah kebutuhan yang ada dilapangan serta pertimbangan akal sehat.

Landasan kebijakan dalam pendidikan adalah petunjuk dan pedoman bagi pelaksana pendidikan dalam rangka menjalankan kegiatan pendidikan dan biasanya mempunyai keterikatan yang kuat dengan hukum dan peraturan Undang Undang yang diberlakukan di tiap negara, selanjutnya ditetapkan dan dikeluarkan oleh yang berwenang. Ketentuan atau kebijakan yang ditetapkan dan berlakukan pemerintah dibidang pendidikan pastinya memiliki dasar yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, dengan melihat pertimbangan di masyarakat dari kebutuhan yang dibarengi dengan perkembangan ilmu dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi (Agustino, 2008). Dalam artian lain, kebijakan pendidikan baiknya mewujudkan salahsatu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, karena kebijakan pendidikan adalah jalan utama dari keunggulan dan eksistensi bagi negara bangsa dalam persaingan dunia, maka dari itu, kebijakan sistem pendidikan butuh mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi (Riant Nugroho, 2004).

kebijakan sistem pendidikan erat kaitannya dengan kebijakan yang ada di lingkup kebijakan public, tetapi dengan catatan bahwa kebijakan sistem pendidikan yang ada di Indonesia tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Disaat kebijakan publik ada yang berubah maka kemungkinan besar kebijakan pendidikan juga berubah.

Kebijakan pendidikan mempunyai karakteristik khusus, diantaranya:

1. Mempunyai tujuan pendidikan. Tujuan yang disusun lebih khusus, dan juga harus lebih jelas serta terarah dalam memberikan kontribusi di pendidikan.
2. Memenuhi dari aspek legal dan formal. Sudah tentu diberlakukannya kebijakan pendidikan maka dari itu perlu terpenuhinya prasyarat demi kebijakan berlaku dengan sah serta diakui disebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan wajib penuhi persyaratan konstitusional berdasar konstitusi yang berlaku hingga dapat dikatakan sah dan resmi diberlakukan. Sehingga, kebijakan pendidikan yang muncul adalah kebijakan pendidikan yang legitimate.
3. Mempunyai konsep operasional. Kebijakan pendidikan merupakan panduan yang sifatnya umum, tentu harus memiliki manfaat operasional agar dapat diimplemetasikan, juga ini merupakan keharusan agar memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang akan dicapai.
4. Dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan yang dbuat oleh ahli dibidangnya yang mempunyai hak serta wewenng dalam pembuat kebijakan. Bertujuan supaya tidak muncul masalah atau kerusakan pada pendidikan dan lingkup diluar pendidikan.
5. Bisa dievaluasi. Kebijakan pendidikan tidak lepas dari keadaan yang sesungguhnya kebijakannya harus d tindaklanjuti. Apabila kebijskan itu baik maka dapat dikembangkan atupun dipertahankan, sedangkan jika terdapat kesalahan, harus dapat dievaluasi atau diperbaiki lagi.
6. Mempunyai sistematika. Kebijakan pendidikan tentu juga adalah suatu sitem. Maka dari itu harus mempunyai sistematika yang jelas tentang segala aspek yang akan diatur. Sistematika dituntut harus efektif, efisien dan berkelanjutan agar kebijskan pendidikan tidak bersifat pragmatis, diskriminatif serta tidak rapuh di strukturnya akibat dari faktor-faktor yang hilang dan berbenturan ssatu dengan yang lainnya. Hal ini agar kedepannya tidak adanya kecacatan atau kerusakan hukum baik internal ataupun eksternal (Subarsono, 2013).

Dengan demikian, sistem pendidikan di Indonesia perlu diarahkan untuk mencapai tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan harus diakui sebagai hak dasar bagi setiap warga negara, yang berhak mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status ekonomi maupun sosial, ataupun suku, etnis maupun jenis kelamin sekalipun.

Masalah Kebijakan Sistem Pendidikan di Indonesia

Di Indonesia tentu ada banyak kasus permasalahan dalam sistem kebijakan pendidikan, misal saja pemerataan dan perluasan akses pendidkan, seperti pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk mendukung biaya operasional, perbaikan fasilitas kelas yang rusak, Pembangunan sekolah dan penambahan ruang kelas baru, implementasi konsep sekolh satu atap, pelaksanaan sekolah wajib selama 12

tahun serta penanggulangan masalah terkait guru mulai dari kebutuhan, distribusi serta peningkatan kualitas guru, selain itu, kasus *drop out* (DO) dan angka putus sekolah juga perlu diperhatikan secara serius untuk menjamin kesuksesan sistem Pendidikan (Arwildayanto, et al. 2018). Masalah yang sampai sekarang masih kerap terjadi di dunia pendidikan adalah kasus kekerasan yang terjadi di lingkup sekolah. Kekerasan terhadap anak ini tidak hanya terjadi di ranah privat bahkan sudah masuk ke ranah public contohnya adalah sekolah yang kerap menjadi pusat perhatian. Dan pelaku dari tindak kekerasan yang ada di lingkup sekolah atau pendidikan ini adalah guru kepada murid atau antar murid itu sendiri. Kekerasan yang terjadi terhadap anak di lingkup sekolah sulit berhenti jika tidak ada tindak lanjut dan sikap yang tegas dari pemerintah terhadap oknum atau pelaku serta diikuti dari penegakan kebijakan. Ini sudah menandakan bahwa masih banyak sekali permasalahan sistem pendidikan yang ada di negeri ini.

Beberapa hambatan atau problematika yang ada dalam lingkup kebijakan sistem pendidikan yang ada di Indonesia diantaranya:

1. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana

Kualitas pendidikan yang ada di kota dan yang ada di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) tentu sangat berbeda dan terdapat kesenjangan yang bisa dikatakan cukup besar, dari fasilitas yang kurang memadai bahkan ada yang tidak memiliki fasilitas sama sekali. Dari pemberitaan media ataupun kita lihat secara langsung bahwa kondisi yang ada di daerah pedesaan ataupun daerah 3T masih jauh dari kata layak. Misal saja kondisi bangunan sekolah yang rapuh bahkan hampir runtuh, dan saat musim hujan atap yang bocor tentu akan mengganggu proses belajar mengajar.

Sarana dan prasarana yang rusak di sekolah baik ruang kelas, perpustakaan atau laboratorium dan tidak menunjang proses pembelajaran yang kondusif menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan sistem pendidikan karena proses pendidikan menjadi tidak efektif. Pendapat menurut Yustikia, mengatakan bahwa sarana dan prasarana memiliki keterkaitan yang signifikan dengan pembelajaran di sekolah. proses pembelajaran yang tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai cenderung memiliki dampak yang kurang positif pada pengalaman belajar. Akibatnya, Proses belajar tersebut akan dinilai kurang memuaskan (Yustikia, N.W., 2017).

Masalah dari rendahnya sarana dan prasarana di sekolah-sekolah di daerah terpencil atau daerah 3T merupakan permasalahan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, kendala dalam penyaluran dana yang menghambat, kemudian penyalahgunaan dana sekolah, kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak sekolah terhadap sarana dan prasarana serta berbagai faktor lainnya.

2. Rendahnya kualitas guru dan tenaga pendidik yang tidak merata

Peran dari seorang guru sangat berpengaruh penting pada keberhasilan pendidikan. Namun di daerah yang terpencil atau pedesaan dan juga di perbatasan, kendala yang biasa terjadi adalah jumlah guru yang sedikit hanya sekitar 4-5 orang, berbeda yang terjadi di daerah perkotaan yang bertahan atau bahkan bertambah karena sarana dan prasarana yang ada juga semakin meningkat bahkan ketersediaan guru

menumpuk. Oleh karena itu sekolah yang kekurangan guru di pedesaan atau daerah 3T menjadi semakin terpuruk dan terisolasi.

Menurut Suparno, bahwa di Indonesia saat ini diperlukan guru yang menjalankan segala tugas dengan penuh dedikasi karena mereka melihat sebagai panggilan bukan hanya sekedar tuntutan pekerjaan semata (Suparno, P., 2004). Seorang tenaga pendidik harus menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya mulai dari mendidik siswa, mengajar, membimbing melatih peserta didik dan menilai siswanya. Namun tak jarang ada yang menggampangkan profesi guru dengan beranggapan bahwa siapa saja dapat mengajar. Guru yang hanya sekedar mengajar saja demi penghasilan dan banyak masalah lainnya, Ini juga mempengaruhi dari kualitas guru yang ada, selain dari itu dari segi kuantitas serta salah satu faktor dari pemerataan pendidik yang kurang karena kondisi geografis negara Indonesia yang begitu luas menjadi kesenjangan pemerataan tenaga pendidik di Indonesia, ada sekolah yang tenaga pendidiknya sangat banyak tapi ada juga sekolah yang bahkan sangat kekurangan guru.

Oleh karena itu, pemerintah seharusnya lebih meningkatkan dan membuat terobosan baru dalam meningkatkan pendidikan nasional, dalam artian adanya upaya dalam pelatihan untuk guru-guru dan juga pemerataan guru dan kualitas guru di Indonesia.

3. Masalah kurikulum di Indonesia

Banyak masalah yang terjadi segi kurikulum dan pembelajaran di Indonesia. Kurikulum adalah rancangan atau program dari penyelenggara pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Di Indonesia sendiri setidaknya sudah mengalami perubahan kurikulum sebanyak 10 sampai 11 kali perubahan terhitung dari Indonesia Merdeka. Perubahan kurikulum yang terus berganti tentu menjadi hal yang membingungkan, apalagi bagi pendidik, peserta didik dan juga orang tua (Hengki Nurhuda, 2022.). Kurikulum yang ditetapkan dianggap sangat kompleks, dan hal ini menimbulkan beban bagi pendidik yang harus menguasai banyak materi dan mengajar dengan beban tersebut. Sementara itu, peserta didik juga merasa terbebani oleh jumlah materi yang harus dikuasai. Para siswa harus berusaha keras untuk memahami serta mengejar seluruh materi yang telah ditetapkan.

4. Biaya pendidikan yang mahal

Mahalnya biaya pendidikan sangat memberi beban kepada Masyarakat yang berada di kalangan ekonomi menengah kebawah. Istilah yang menjadi rahasia umum di Masyarakat seperti anggapan “pendidikan itu mahal” dan “semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi juga biaya yang dikeluarkan”. Ini harusnya menjadi perhatian utama bagi pemerintah, mengingat biaya pendidikan yang tinggi menjadi dampak yang sangat membebani Masyarakat. Tak sedikit Masyarakat yang memilih jalan berhenti sekolah atau putus sekolah disbanding harus mengeluarkan biaya yang besar. Selain itu banyak juga anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikannya namun terpaksa harus berhenti karena terkendala atau tidak memiliki biaya untuk pendidikan. Biaya pendidikan yang mahal berdampak pada tidak meratanya pendidikan di Indonesia selain itu berdampak pada segala aspek di kehidupan.

Kesimpulan dan Saran

Pendidikan adalah suatu proses yang penting dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasan, kreatifitas atau keterampilan, akhlak dan memperkuat kepribadian. Indonesia sendiri merupakan negara dengan begitu sangat peduli terhadap pelaksanaan pendidikannya. Kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia punya karakteristik diantaranya a) mempunyai tujuan pendidikan, b) memenuhi dari bidang legal dan formal, c) mempunyai konsep operasional, d) dibuat oleh yang berwenang, e) dapat dievaluasi, dan f) mempunyai sistematika. Di Indonesia, banyak masalah-masalah yang ada di sistem kebijakan pendidikan semacam kualitas sarana dan prasarana yang rendah, Rendahnya kualitas guru dan tenaga pendidik yang tidak merata, Masalah kurikulum di Indonesia, dan Biaya pendidikan yang mahal.

Pemerintah hendaknya berperan besar terhadap kebijakan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Terutama terhadap segala masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan, selain dari peran pemerintah peran dari Masyarakat baik dari orang tua maupun peserta didik dan tenaga pendidik sangat dibutuhkan. Dari segala pihak, baiknya bekerja sama demi meningkatkan kualitas pendidikan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. (2006). Kebijakan publik. Jakarta. Suara Bebas
- Agustino. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
- Arwildayanto, dkk. (2018). Analisis kebijakan pendidikan kajian teoritik, eksploratif, dan aplikatif. Bandung: Cendekia Press.
- Nurhuda, Hengki. (2022). Masalah-masalah pendidikan nasional; faktor-faktor dan solusi yang ditawarkan. Dirasah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan dasar.
- Riant Nugroho, Dwijowijoto. (2004). Kebijakan publik. Jakarta: PT Alex Media Komputindo
- Subarsono. (2013). Analisis kebijakan publik. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Suparno, P. (2004). Pendidikan dan peran guru. Jakarta: Buku Kompas.
- Yustikia, N.W. (2017). Pentingnya sarana pendidikan dalam menunjang kualitas pendidikan di sekolah. Jurnal Pendidikan Hindu.